

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi yang memiliki semboyan “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”, Indonesia seyogyanya menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang paling utama. Salah satu hal yang menjadi perwujudan kepentingan rakyat adalah memiliki seorang pemimpin (*Leader*). Dalam konteks demokrasi, pemimpin merupakan seseorang yang dipilih oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Indonesia dalam menjalankan proses demokrasi dalam memilih seorang pemimpin memiliki cara yaitu dengan Pemilihan Umum (Pemilu), di Indonesia mempunyai empat macam pemilihan, yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati/Walikota.

Sebelum tahun 2005, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pilkada. Hal ini sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat UUD RI 1945 pada pasal 18 ayat ke (4) yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Hasil amandemen kedua ini menjadi sebuah revolusi

administrasi pemerintahan di tingkat daerah dimana rakyat menjadi representasi atas kekuasaan mutlak penentu kepala daerah yang akan terpilih (Sirajuddin et al., 2016).

Pilkada langsung oleh rakyat memberikan rasa optimisme kepada publik dengan membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik selanjutnya di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya sesuai dengan amanat UUD 1945 secara lebih nyata tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik (Irtanto, 2008, p. 149).

Proses mewujudkan pilkada yang demokratis di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum mengenai pelaksanaannya. Dasar hukum yang mengatur tentang proses pemilihan kepala daerah pertama kali ialah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dimana dalam Undang-undang ini seorang calon yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan harus di usulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 muncul sebagai perubahan kedua atas undang-undang sebelumnya, dimana dalam undang-undang ini mengakomodasi kepada mereka yang ingin mencalonkan diri dalam kontestasi tidak harus bergabung ke dalam partai politik melainkan dapat maju melalui jalur *independent* atau perseorangan dengan syarat mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Setelah melewati berbagai proses menciptakan kualitas demokrasi di daerah, pada tahun 2020 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia no 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang Menjadi undang-undang.

Keputusan diatas merupakan respon cepat yang diambil oleh Pemerintah Indonesia terhadap bahaya kesehatan yang dialami oleh seluruh warga Indonesia karena Pandemi Virus Corona yang tidak diketahui sampai kapan berlangsungnya serta menciptakan proses demokrasi di tingkat daerah yang baik melalui pilkada yang menjamin kualitas demokrasi dan rotasi kekuasaan di daerah dalam masa pandemi covid-19.

Pilkada serentak tahun 2020 yang diadakan Indonesia merupakan pilkada serentak kali ke 4 yang dilaksanakan setelah pilkada serentak 2015, 2017 dan pilkada serentak 2018. Pilkada serentak 2020 di ikutsertakan oleh 9 provinsi yang terdiri atas 224 Kabupaten dan 43 kota (Tim Detikcom, 2020). Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang ikut serta pada Pilkada Serentak tahun 2020 menjadikan ini kali kedua pilkada serentak yang diikuti pada tahun 2015 sejak dimekarkan dari yang sebelumnya bernama Tanjung Jabung pada tahun 1999.

Pilkada serentak 2020 yang nantinya diselenggarakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempertemukan 2 pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 yakni Abdul Rasid dan Mustakim menantang pasangan calon nomor urut 2 yaitu pasangan Romy Haryanto dan Robby Nahliansyah. Hal menarik terlihat pada pasangan calon nomor urut 2 merupakan pasangan petahana yang mana mereka berduet kembali dalam kontestasi pilkada serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui jalur perseorangan atau independen tanpa menggunakan kendaraan politik yang membesarkan nama mereka pada pilkada serentak tahun 2015 lalu yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).

Melalui Beritajambi.co (2020) tepat tanggal 24 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka daftar bakal calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2020 - 2024 dan pada hari yang sama pula dengan diantar oleh ribuan simpatisan terdiri dari tim pemenangan serta masyarakat, pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana yaitu Romi Hariyanto berserta wakilnya pada periode sebelumnya Robby Nahliansyah secara resmi mendaftar melalui jalur independen.

Munculnya fenomena calon petahana yang maju kembali dalam kontestasi pilkada bukanlah sesuatu hal yang baru, dikutip dari CNN Indonesia (2020) dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, ada sekitar 290 calon petahana dari 236 daerah, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sekitar 87,40 % dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak merupakan para calon petahana.

Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah merupakan salah satu dari 290 calon petahana yang ikut kembali dalam kontestasi pilkada serentak 2020. Namun bukannya maju menggunakan kendaraan politik pasangan petahana tersebut lebih memilih menggunakan jalur independen, mengingat keduanya merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang mempunyai *track record* bagus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak di mekarkannya kabupaten ini pada tahun 1999 hingga sekarang posisi Eksekutif dan Legislatif selalu dikuasai oleh Kader Partai Amanat Nasional.

Dominasi PAN tersebut terlihat pada pemilihan legislatif periode 2004-2009 dimana PAN memperoleh kursi sebanyak 13 kursi dari 30 kursi atau 43,4%, pada periode 2009-2014 mendapatkan 12 kursi dari 30 kursi atau 40% , periode 2014–2019 mendapatkan 15 dari 30 kursi atau sekitar 50%, dan pada periode 2019-2024 mendapatkan 17 kursi dari 30 kursi atau sekitar 56,7 % kursi yang tersedia di legislatif.

Dalam konteks kekuasaan eksekutif, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama berturut-turut merupakan kader PAN yaitu Drs. H. Abdullah Hich yang menjabat selama 2 periode mulai tanggal 12 April 2001–12 April 2011, kemudian H.Zumi Zola S.T.P., M.A yang melanjutkan kepemimpinan Bupati mulai tanggal 12 April 2011 hingga 6 Oktober 2015 tidak genap selama 5 tahun dikarenakan mengundurkan diri dan ikut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jambi kemudian digantikan oleh wakil bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan terakhir yaitu H. Romi Haryanto S.E yang di lantik

pada tanggal 12 April 2016–hingga sekarang dan ikut kembali dalam Pilkada Serentak 2020 serta berstatus sebagai petahana.

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa dominasi Partai Amanat Nasional selalu mengungguli kursi Legislatif di DPRD Kabupaten/Kota selama 4 periode, di samping itu kontestasi pilkada langsung selalu di menangkan oleh calon bupati dan wakil bupati dari kader PAN yang telah dimulai pertama kali pada tahun 2001 hingga 2015 yang lalu, dengan demikian maju dalam kontestasi pilkada serentak di Tanjung Jabung Timur menggunakan jalur partai PAN merupakan suatu pilihan yang tepat mengingat *track record* yang bagus serta dominasi yang kuat di legislatif dan eksekutif.

Berkaca dari pilkada serentak 2018 yang lalu, dikutip melalui Kompas.com (2018) dalam pilkada serentak 2018 setidaknya ada 46 Bupati/Walikota dan 2 Gubernur petahana yang kembali memenangkan kontestasi pilkada serentak 2018. Para calon petahana memilih maju menggunakan partai politik yang sama atau mencoba merangkul partai lain yang menjadi lawan dengan tujuan mengamankan suara kemenangan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1.Calon petahana yang menang pilkada serentak tahun 2018

No.	Petahana	Daerah Pemilihan	Suara	Partai Pengusung
1.	Nikson Nababan	Tapanuli Utara	69.375	PDI-P, PAN, Nasdem, PKB, dan Partai Golkar
2.	Octavia Jayabaya	Lebak	453.938	Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, PKS, PAN, Hanura,

				PKB, PPP, Nasdem, Gerindra, PBB
3.	I Nyoman Suwirta	Klungkung	92.944	Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Golkar
4.	Rudy Gunawan	Garut	428.113	Gerindra, PKS, Nasdem

*Sumber : Data tahun 2018 yang diolah*

Berdasarkan data tabel diatas, para calon petahana yang memenangkan kontestasi pilkada serentak 2018 melakukan strategi mengamankan dukungan dari partai politik yang mendominasi daerah tersebut. Salah satu calon petahana yang menang di Kabupaten Lebak yaitu Octavia Jayabaya melakukan strategi merangkul 11 partai politik agar dapat memenangkan pilkada serentak tahun 2018.

Para petahana secara diatas kertas memang di unggul kan oleh berbagai aspek baik elektabilitas figur serta dukungan partai politik. Oleh karena itu, fenomena Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah menjadi fenomena politik baru dalam konteks ke-lokalan di Indonesia. Disamping mereka pasangan petahana dan kader PAN, Romi Haryanto sampai saat ini masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN tetapi lebih memilih maju kembali dengan wakil bupati sebelumnya yaitu Robby Nahliansyah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 tanpa menggunakan kendaraan partai yang telah memenangkan mereka pada tahun 2015 lalu.

Disamping itu, hal mengejutkan juga terjadi kepada PAN sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 yang mendapatkan 17

kursi dari 30 kursi atau sekitar 56,7% lebih dari cukup untuk dapat mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai mereka, namun dalam kenyataannya PAN sama sekali tidak mendaftarkan pasangan bakal calon mereka ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ada satu fenomena politik yang menarik, dikutip dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (2016) survei yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) terhadap hasil pilkada serentak tahun 2015 yang lalu, menggambarkan bahwa calon independen yang maju dalam pilkada serentak tahun 2015 sebanyak 35% namun yang menang hanya sebesar 14,4% artinya iklim politik lokal di Indonesia dalam memenangkan calon independen masih sangat rendah disamping itu calon independen harus melawan dominasi petahana beserta partai pendukungnya. Namun dalam hal ini, Romi Haryano dan Robby Nahliansyah memang berstatus sebagai petahana dan juga berstatus sebagai pasangan independen dimana ini pertama kalinya seorang petahana juga merangkap sebagai calon independen dalam kontestasi politik di tingkat lokal.

Berkaca dari pilkada serentak 2015 yang lalu dan peluang kemenangan calon independen yang relatif sedikit tersebut serta hubungan yang tercipta antara Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah dengan partai PAN membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa fenomena majunya pasangan petahana jalur independen dalam kontestasi pilkada serentak 2020 berdasarkan perspektif teori kubus kekuasaan (*powercube theory*) oleh John Gaventa (2006) dalam tulisannya yang berjudul "*Finding the Spaces for Change: A Power Analysis*". Teori *powercube* mempunyai 3 dimensi yakni dimensi level, ruang,



dan bentuk yang berguna dalam proses eksplorasi berbagai aspek kekuasaan serta bagaimana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain (Chalik, 2017, p. 58; Halim, 2014, p. 55).

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian skripsi yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu: Analisis majunya pasangan petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah melalui Jalur independen pada pemilihan kepala daerah Tanjung Jabung Timur tahun 2020 berdasarkan perspektif teori kubus kekuasaan (*powercube theory*)?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara teoritis mengenai bagaimana analisis majunya pasangan petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah melalui jalur independen pada pemilihan kepala daerah Tanjung Jabung Timur tahun 2020 menggunakan perspektif teori kekuasaan (*powercube theory*).

## **1.4.Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Pemilu di Indonesia dalam konteks pilkada di daerah

serta diharapkan dapat memberikan referensi baru mengenai politik petahana jalur independen dalam konteks gejolak politik lokal di Indonesia.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis-analisis terhadap fenomena politik petahana jalur independen kepada semua pihak baik pemangku kepentingan, legislatif serta masyarakat banyak. Melalui penelitian ini penulis mengharapkan agar menjadi sumber bacaan untuk pemangku kepentingan, legislatif dan masyarakat khususnya yang memiliki ketertarikan terhadap politik lokal.

### 1.5.Literature Review

Dalam menjelaskan fenomena yang terjadi pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian yang memiliki relevansi untuk menjadi bahan literatur:

1. Penelitian Oleh Khoirun dan Ahmad Siboy (2018) yang berjudul “Kemenangan Petahana (Incumbent) Pada Pilkada 2015 Di Kota Surabaya Dan Kabupaten Malang: Strategi Politik Dan Marketing Politik” menghasilkan bahwa terpilihnya para petahana atau *incumbent*, baik dalam pemilihan walikota Surabaya serta Kabupaten Malang berasal dari adanya faktor modal sosial dan modal politik positif di mata masyarakat, sementara itu dalam rangka mendapatkan simpati dari masyarakat sebagai pemilih (*voters*), para petahana selalu

menyampaikan semua hasil keberhasilan infrastruktur pembangunan di daerah, terkhusus bagi pasangan petahana Rendara-Sanusi di Kabupaten Malang dapat memaksimalkan program Bina Desa, sedangkan pasangan petahana Risma - Wisnu menitikberatkan pada kegiatan *Door to door* ke masyarakat langsung dan tidak lupa kemenangan mereka juga tidak terlepas dari kekompakan kader internal PDIP Kota Surabaya beserta para relawan yang tersebar di penjuru Kota Surabaya.

2. Penelitian Oleh Dwi Elsa Wahyuni (2018) yang berjudul “Komunikasi Politik Calon Walikota Petahana Dr.H.Firdaus,St,Mt Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Walikota Pekanbaru 2017-2022” menghasilkan bahwa gaya komunikasi politik calon walikota petahana menggunakan komunikasi verbal serius, tegas, detail, serta tidak bertele-tele di kolaborasikan dengan bahasa yang sederhana serta mengedukasi saat berkampanye. Selain hal itu pasangan tersebut juga merepresentasikan ciri khas dengan menggunakan pakaian adat melayu biru beserta songket yang dipadukan dengan kemeja putih, ramah. Kemudian strategi politik dalam membentuk *political branding* dimana pasangan ini menggunakan media, seperti media sosial, kemudian menggunakan produksi pesan yaitu dengan menyusun dan membuat pesan yang ingin

disampaikan kepada *voters* dengan sebaik mungkin serta memperhatikan isi pesan yang akan disampaikan baik lisan maupun tulisan. Strategi kampanye dialog, berdiskusi secara langsung kepada masyarakat serta menerima aspirasi.

3. Penelitian Oleh Ellisa Vikalista, Mellynda Riana Wati, dan Tartil Anwar (2020) yang berjudul “Mengungguli Sang Petahana : Kemenangan Sukamta-Abdi Rahman Dalam Pilkada Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018” menghasilkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pasangan Sukamta dan Abdi Rahman ini, telah berhasil membangun dan mengakumulasikan beberapa dari cakupan modal sosial diantaranya yaitu: jaringan, status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll), kekuatan pengaruh dalam masyarakat serta pengurus organisasi besar dan terhormat. Keseluruhan cakupan modal sosial yang dimiliki pasangan Sukamta dan Abdi Rahman ini diperoleh melalui proses interaksi yang dilakukan secara langsung dan terus-menerus. Sukamta dan Abdi Rahman ini juga selaras dengan apa yang disampaikan dalam teori Kacung Marijan telah berhasil mengakumulasikan dari beberapa cakupan modal politik yang dimilikinya, seperti: jabatan politik, pengalaman mengorganisasi masa, reputasi dan legitimasi yang dipergunakan di dalam menarik dukungan di masyarakat.

4. Penelitian Oleh Amri Yusra dan Ikhsan Darmawan (2017) yang berjudul “Kepentingan Petahana Dalam Manipulasi Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015” menghasilkan bahwa manipulasi yang terjadi pada Pilkada Labuhan Batu tahun 2015 terjadi karena disebabkan oleh kepentingan memenangkan petahana, sementara itu terjadi manipulasi yang terjadi juga karena didukung oleh adanya kelemahan dalam aturan tentang proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Tindakan tersebut bertujuan untuk menggagalkan calon lain sehingga kemenangan petahana lebih mudah diraih karena hanya melawan calon “boneka”, terjadi karena adanya kepentingan memenangkan petahana dan pasangan calon lain dinilai berpotensi menyulitkan petahana jika tidak digagalkan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aninditya Normalitasari dan Laila Kholid Firdaus (2020) yang berjudul “Hegemoni Rezim Politik Di Ranah Lokal : Studi Kasus Di Kabupaten Pati Di Bawah Kepemimpinan Haryanto” menghasilkan bahwa Rezim politik lokal bisa dengan sendirinya membentuk aktor-aktor lokal di daerah serta dapat bekerja dikarenakan adanya kekuasaan yang dimilikinya dimana aktor tersebut tidak dapat dipisahkan dalam birokrasi, aktor-aktor tersebut terdiri atas aktor formal yang terdiri atas DPR serta Forkopimda dan informal seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kekuasaan dalam

konteks ruang tertutup kebanyakan dijadikan sebagai ruang untuk membentuk kesepakatan antar para aktor baik formal maupun informal, kesepakatan ini meliputi jual beli jabatan atau sekedar politik balas budi yang di lakukan oleh pejabat publik kepada partai politik atau dengan individu yang sebelumnya telah mendukung pada saat proses pencalonan hingga pada akhirnya kekuasaan yang didapat cenderung elit dan mementingkan golongan tertentu.

6. Penelitian yang di lakukan oleh Muh Irfan (2018) yang berjudul “KEKUATAN POLITIK BIROKRASI (Studi Terhadap Kemenangan Petahana Hatta Rahman Pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2015)” menghasilkan bahwa keterpilihan kembali pasangan petahana disamping karena jaringan sosial yang kuat serta didukung oleh partai politik, juga dipengaruhi oleh akses besar terhadap kalangan birokrasi untuk memperoleh dukungan. Dengan memanfaatkan kekuatan birokrasi, petahana dengan mudah dapat melanggengkan kekuasaannya , strategi seperti ini menjadi cukup efektif dalam memenangkan kontestasi politik pilkada. Adapun bentuk kekuatan politik birokrasi sang petahana antara lain jaringan yang luas serta didukung oleh sistem organisasi yang masif, akses terhadap penguasaan sumber daya, instrumen komunikasi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, dan representasi kepemimpinan politik.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Hadiq Abrori (2019) yang berjudul “Strategi Pemenangan Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015 (Saiful Illah–Nur Ahmad Syaifudin)” menghasilkan bahwa Strategi politik yang digunakan oleh tim sukses calon petahana melalui gerakan struktural yaitu gerakan langsung meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Banom-banomnya, Nahdlatul Ulama (NU) beserta Banom-banomnya. Selain strategi tersebut, tim sukses petahana melakukan strategi pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh agama seperti kyai di kampung.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Hikmah (2015) yang berjudul “Kandidat Petahana DPRD Kota Surabaya Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Deskriptif Caleg Terpilih Melalui Partai Kebangkitan Bangsa)” menghasilkan bahwa Ada tiga buah faktor yang melatarbelakangi patahana mencalonkan diri kembali yaitu faktor keinginan sendiri yaitu jika mereka ingin berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah kemudian dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan politik maka mereka harus masuk di dalam sebuah sistem lembaga yang berlegitimasi yakni DPRD karena dengan menjadi bagian di dalamnya akan lebih mudah memperjuangkan aspirasi masyarakat, faktor konstituen yang mengharapkan

kembali calon petahana untuk maju bermakna seberapa besar masyarakat kota Surabaya masih menginginkan dirinya untuk maju kembali serta bagaimana lingkungan politik yang akan mendukung pencalonannya, dan faktor para kyai yang memberikan amanah kepada calon petahana untuk kembali ikut ber-kontestasi artinya seberapa besar kiai memberi dukungan karena apabila kandidat petahana mendapat dukungan dari kiai secara otomatis akan mempengaruhi perolehan suara guna mendapat dukungan massa mengingat kedudukan kiai yang sangat dihormati, disegani, dijunjung tinggi kedudukannya dan menjadi sosok figur panutan di masyarakat, utamanya yang mayoritas beragama islam sehingga tidak jarang apapun yang dikatakan kiai maka akan ditaati dan dilakukan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Muhammad (2017) yang berjudul “Kekalahan Petahana Dalam Pilkada 2015 Di Kabupaten Luwu Utara” menghasilkan bahwa Masyarakat menilai sang petahana telah gagal dilihat dari program kerjanya baik di sektor pertanian dan pelayanan dasar publik meliputi kesehatan, infrastruktur serta keamanan, di sisi lain calon penantang sang petahana dianggap mempunyai hasil kinerja yang lebih baik ketika menjadi wakil bupati dari sang petahana, meliputi interaksi baik yang terbangun dengan masyarakat serta seringnya mengikuti forum untuk membahas masalah isu-isu



pelayanan publik serta perannya yang lebih aktif dalam memediasi konflik sosial yang terjadi.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh. Dzul Fadli, Indrawan Tobarasi, dan Komeyni Rusba (2018) yang berjudul “Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube” menghasilkan bahwa kemenangan para petahana tidak terlepas dari *power* atau kekuasaan, jualan program pembangunan yang menjadi investasi politik, sementara itu adanya politisasi ASN, monopoli parpol, politik representasi melalui pemuka agama dan pemuka adat alhasil mengakibatkan adanya komunikasi yang dibangun langsung di berbagai tingkatan baik oleh para calon maupun partai politik, dan masyarakat yang merupakan bentuk-bentuk dari adanya penggunaan *power* kekuasaan itu sendiri.

Berdasarkan *literature review* diatas, adapun yang membedakan penelitian yang terdahulu adalah objek atau subjek penelitiannya yaitu pasangan petahana bupati serta wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah maju kembali dalam Pilkada Serentak tahun 2020 melalui jalur independen atau perseorangan. Hal ini menjadi menarik bagi penulis dimana pasangan petahana ini merupakan kader partai penguasa wilayah Tanjung Jabung Timur yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada Pilkada langsung tahun 2015 lalu mengantarkan pasangan petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah memenangkan Pilkada tahun 2015.

## **1.6.Kerangka Teori**

### 1.6.1. Pilkada

Perubahan iklim politik dari masa orde baru menuju reformasi yang pada awalnya bercorak sentralistik menjadi desentralistik atau yang biasa dikenal dengan otonomi daerah mengharuskan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 2005 merupakan produk dari Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih memiliki kekurangan dalam hal penciptaan demokrasi lokal. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat terus berusaha untuk mewujudkan terciptanya demokrasi lokal yang dapat mengakomodasi segala kepentingan hingga pada akhirnya memutuskan untuk memasukan proses pilkada di daerah menjadi pilkada serentak yang pertama kali pada tahun 2015, 2018, dan sekarang yaitu 2020 dengan melahirkan Undang-undang Republik Indonesia no 6 tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang”.

Dalam Undang-undang no.1 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota”. Sementara itu Undang-undang no. 10 tahun 2008 dalam pasal 4 menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

1. Langsung

Rakyat didaerah sebagai pemilih (*voter*) memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara.

2. Umum

Seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilih-nya, tanpa memandang perbedaan yang ada.

3. Bebas

Warga negara bebas dapat memberikan suaranya tanpa ada paksaan serta diskriminasi dari siapapun.

4. Jujur

Panitia pelaksanaan pemilihan bersikap jujur serta menjunjung tinggi peraturan perundangan yang telah di sahkan.

5. Rahasia

Para pemilih (*voters*) dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan siapapun.

6. Adil

Panitia penyelenggara pemilu bersikap adil kepada pemilih tanpa diskriminasi apapun.

Fungsi dari pilkada dalam melaksanakan pemerintahan daerah yaitu:

1) Masyarakat dapat memilih kepala daerah yang memahami daerah tersebut; 2) Pilkada diharapkan agar masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi, serta program yang akan dilaksanakan kepala daerah selama masa jabatan; 3) Dengan Pilkada maka masyarakat dapat melakukan kontrol dan evaluasi politik terhadap kepala daerah.

#### 1.6.2. Calon Independen

Calon independen merupakan seseorang yang berasal dari kalangan masyarakat yang ikut serta dalam proses pemilihan umum tanpa menggunakan mekanisme kendaraan politik kepartaian melainkan dengan kemampuan dan kekuatan pribadi. Undang-undang no 8 tahun 2015 pasal 1 menyebutkan bahwa :

*“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. Calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum kabupaten/kota”.*

Undang-undang diatas secara regulasi telah mengakomodasi terbukanya peluang bagi calon pasangan kepala daerah untuk dapat maju dalam kontestasi pilkada di ditingkat provinsi sebagai gubernur atau wakil

gubernur, ditingkat kabupaten kota sebagai bupati / walikota dan wakil bupati dan wakil walikota melalui jalur perseorangan atau independen.

### 1.6.3. Petahana/*Incumbent*

Petahana Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat. Dalam skala yang berbeda istilah petahana dapat diartikan sebagai *incumbent* yang berarti pihak yang menempati suatu supremasi atau kepemimpinan yang sah dan kembali ikut serta dalam kontestasi pemilu. Di ruang lingkup politik dan pemerintahan, istilah petahana muncul ketika seseorang yang memiliki jabatan kemudian mencalonkan kembali untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya. Menurut Gordon & Landa dalam Nawawi (2019, p. 24) menyatakan bahwa :

*“The position of incumbent on election events in developing countries, either the center or the selection region is indeed much benefited as the public service and the truth. On other side, incumbent figure many gain an advantage over his position. Mastery over the problem solving capacity, mastery over service, mastery over the image make it can better win the election event”.*

Petahana yang kembali ikut serta dalam kontestasi politik pilkada di daerah setidaknya memiliki peluang yang sangat besar dari segi keuntungan dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan secara langsung adalah dari segi popularitasnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai kepala daerah, hubungan yang terjalin antara petahana dan konstituen menjadi begitu erat. Kapasitas calon petahana akan lebih mendapatkan porsi di masyarakat yang kemudian memiliki dampak positif

secara tidak langsung calon petahana akan selangkah di depan dari pasangan calon yang lain dalam memetakan demografi, geografi, kapasitas, serta potensi ekonomi di daerah, pemahaman terhadap kultur hingga adat-istiadat dan lain-lainnya secara sistematis dan empiris melalui kinerja hingga mobilisasi perangkat kerja yang ada di dalamnya.

Kapasitas petahana dalam memenangkan pilkada akan dapat memenuhi apa yang disebut dengan *aggregate frame* yaitu proses mendistribusikan isu dan persoalan yang terjadi di suatu wilayah petahana akan memprioritaskan berbagai persoalan tertentu, baik ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan lain-lainnya. Semua ini akan mengarah pada fakta bahwa langkah yang lebih mudah dalam membangun citra pada kampanye hingga menjelang pemilihan (Nawawi, 2019, p. 25).

Namun tak jarang juga calon petahana gagal dalam memenangkan kontestasi pilkada. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya yaitu pada saat menjadi pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik atau masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan di daerah. Kegagalan calon petahana tersebut seperti menjadi hukuman dari masyarakat karena tidak dapat menjalankan pemerintahan seperti harapan masyarakat.

#### 1.6.4. Pelembagaan Sistem Kepartaian

Mainwaring dan Scully dalam Michael Buehler dan Paige Tan (2007, p. 3) mengatakan bahwa sistem kepartaian yang dilembagakan

umumnya ditemukan pada negara demokrasi industri yang maju, meskipun mereka telah tumbuh di beberapa negara demokrasi yang lebih baru. Sistem yang dilembagakan menghasilkan stabilitas serta struktur pada politik yang membuat sistem tersebut beroperasi dengan prediktabilitas yang lebih besar.

Sistem yang dilembagakan dimana sebuah partai politik dapat memenuhi salah satu fungsi demokrasi terpenting bagi mereka yaitu memungkinkan pemilih meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem yang relatif tidak melembaga dalam hal ini partai politik tidak memberikan struktur yang mendasari operasi politik seperti yang dilakukan oleh sistem kepartaian yang dilembagakan alhasil partai datang dan pergi dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Akar sosial partai lemah menyebabkan ketidakstabilan karena pemilih berpindah dari satu partai ke partai lain.

Partai dalam sistem yang relatif tidak dilembagakan sebagai organisasi sering kali lemah dan banyak yang menampilkan karakteristik personalistik (dimana pemimpin individu lebih penting daripada partai itu sendiri) kurang disiplin dan profesionalisme. Partai-partai yang dilembagakan dengan lemah mempersulit pemerintahan dalam beberapa hal seperti ketika partai cenderung naik dan turun begitu cepat, menjadi sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada para politisi karena kurangnya hubungan antara partai dan kebijakan tertentu yang diberlakukan.

Sementara itu, tanpa akar sosial, partai-partai sering kali tidak selaras dengan kepentingan konstituen mengakibatkan mereka mengembangkan kebijakan serta memerintah dengan cara yang bersebrangan dari keinginan rakyat. Organisasi partai yang lemah terutama yang kurang disiplin membuat pengembangan dan pengesahan program legislatif menjadi tantangan berat.

Dalam sistem yang dilembagakan secara lemah, legitimasi juga sering dipertanyakan, meningkatkan kemungkinan bahwa oposisi pemerintah dapat menggoyahkan atau bahkan menjungkirbalikkan sistem tersebut. Suatu hal yang naif untuk mengharapkan sistem partai yang dilembagakan dengan kuat dan pola pemungutan suara yang stabil dalam pemerintahan yang telah membebaskan diri dari kediktatoran yang kuat seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, ini bukanlah proposisi semua atau tidak sama sekali dimana tingkat pelembagaan yang terlihat masih bisa memberi tahu kita banyak hal.

Hubungan partai dan kandidat ditunjukkan oleh Mainwaring dalam studinya tentang Brasil sebagai elemen kunci dalam persamaan institusionalisasi, ia mengategorikan kedalam empat kriteria untuk menentukan pelembagaan sistem kepartaian. Kandidat di Brasil sangat independen dari partai mereka, sebuah kondisi yang melemahkan partai mereka. Misalnya, ketika pemilihan ditentukan oleh popularitas calon individu, pengaruh dan kekuatan masing-masing partai dapat berfluktuasi dengan liar dari satu putaran ke putaran berikutnya mengakibatkan sistem



persaingan antar partai yang tidak stabil. Selain itu, jika politik didasarkan pada individu dan karismanya, partai tidak perlu memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat. Dalam kasus di mana kandidat secara signifikan lebih penting daripada partai mereka sendiri, partai politik sebagai organisasi gagal memperoleh legitimasi yang seharusnya mereka peroleh dari dukungan pemilih. Terakhir, jika para kandidat dapat dan memang bisa mengumpulkan dana mereka sendiri dan menjalankan kampanye mereka sendiri, maka tidak banyak kebutuhan untuk mengembangkan partai sebagai sebuah organisasi..

#### 1.6.5. Konsep Elit Politik

Secara umum, elit merujuk kepada sekelompok orang-orang yang ada di dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Secara khusus merupakan sebagai sebagian atau sekelompok orang yang eksklusif serta memegang kekuasaan. Sementara itu, menurut Chalik (2017, p. 26) elit diartikan sebagai kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat walau tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Sementara itu, elit politik merupakan individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lainnya, dimana kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan kolektif (Chalik, 2017, p. 37).

Pareto dalam Chalik (2017, p. 40) membagi tipe elit politik menjadi empat bagian sebagai berikut :

1) Elit politik yang memerintah dengan kelicikan

Model elit ini banyak di temukan pada negara yang menganut paham otoriter namun juga kadang ditemukan pada negara yang menganut paham demokrasi;

2) Elit politik yang memerintah dengan cara paksa

Model ini banyak terdapat pada negara penganut paham komunis dan otoriter;

3) Elit politik konservatif

Elit yang mempertahankan kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan;

4) Elit politik liberal

Elit yang bekerja untuk kepentingan umum dan membuka seluas-luasnya bagi setiap anggota masyarakat untuk menyatakan pendapat, memberikan masukan dan kritik.

#### 1.6.6. Teori Modal

Teori modal pertama kali dipelopori oleh Poere Bourdie. Dalam teori modal dijelaskan bahwa teori ini mempunyai ikatan yang erat terhadap persoalan kekuasaan. Dalam pemikirannya, Bourdieu mengkonstruksi atas persoalan dominasi dimana dalam masyarakat politik sangat erat kaitannya terhadap masalah dominasi yaitu persoalan utama sebagai bentuk atas aktualisasi kekuasaan. Namun pada hakekatnya, dominasi tersebut dapat

dilihat tergantung atas situasi, sumber daya dan bagaimana strategi yang dilakukan (Halim, 2014, p. 108). Dalam membangun teorinya, Bourdieu membangun teori tersebut berdasarkan paradigma strukturalisme genetik, dimana paradigma ini memiliki ciri yang khas terhadap internalisasi eksternalitas serta eksternalisasi internalitas dalam pandangan struktur dan agen (Krisdinanto, 2016, pp. 194–197).

Konsep atas teori modal Bourdieu tidak dapat dilepaskan terhadap dominasi lain, sehingga pandangan Bourdieu memiliki keterkaitan terhadap konsep kekuasaan yang lain yaitu habitus dan ranah atau arena. Habitus dalam teori sosiologi diartikan sebagai struktur mental kognitif dengan menghubungkan manusia dengan dunia sosial, sedangkan Ranah atau arena dalam pemikiran Bourdieu merupakan jaringan relasi antar posisi objektif di dalamnya (Ritzer & Goodman, 2009, pp. 581–583). Sementara itu, menurut Marijan (2010) berbicara mengenai kekuasaan ada 3 modal yang harus dimiliki oleh para calon yang ingin ikut dalam kontestasi politik yaitu modal politik (*political capital*), modal sosial (*social modal*), dan modal ekonomi (*economy capital*).

a. Modal Politik

Kimberly Casey (2008) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku atau lembaga politik atas dalam menghasilkan tindakan politik. Casey menjabarkan ada empat pasar politik

yang dimiliki oleh pelaku politik atau lembaga politik diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pasar politik pertama adalah pemilu karena instrumen dasar untuk pemilihan umum adalah sistem demokrasi;
- 2) Pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik;
- 3) Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik;
- 4) Pasar politik keempat yaitu pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai perilaku politik atau lembaga politik.

b. Modal Sosial

Robert Putnam (1993) dalam Baharuddin (2017, p. 212) mengatakan bahwa modal sosial merupakan suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Sementara itu modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Sementara itu menurut Fukuyama (2002, p. 36) modal sosial berupa kapabilitas yang berasal dari kepercayaan

umum di dalam sebuah masyarakat sosial yang paling kecil dan paling mendasar.

#### c. Modal Ekonomi

Dalam konteks pilkada serentak, setiap pasangan calon dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi hendaknya memiliki modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit dikarenakan ada kaitannya terhadap biaya yang besar terhadap penggunaan dana politik itu sendiri. Sahdan dan Haboddin dalam Baharuddin (2017, p. 215) mengatakan bahwa proses politik pilkada memerlukan biaya atau ongkos yang sangat mahal dimana hal tersebut menjadi tantangan bagi proses berkembangnya demokrasi di tingkat lokal karena calon yang bertarung adalah pemilik uang atau modal yang besar.

#### 1.6.7. Teori Konflik

Menurut Ramlan Surbakti (1999, p. 75) konflik dalam perspektif ilmu politik dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik juga mengandung arti “benturan” seperti adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah yang bentuknya dapat berupa kekerasan dan tak berwujud kekerasan.

Menurut Dahrendorf dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2011, p. 151) dalam bukunya yang berjudul “Teori Konflik Sosial”

menjelaskan bahwa timbulnya konflik berawal dari orang – orang yang tinggal bersama–sama serta meletakkan dasar–dasar bagi bentuk organisasi sosial dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam konteks–konteks tertentu serta menguasai posisi–posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan hingga akhirnya melahirkan konflik kepentingan tersebut.

Dalam perspektif Dahrendorf, konflik kepentingan yang terjadi menjadikan sesuatu hal yang tak dapat terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tak berkuasa. Teori konflik Dahrendorf muncul atas reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktivitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompok dan masyarakat disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dengan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi di dalam diri individu. Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai

struktur yaitu hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur sosial. Dengan kata lain, konflik antara kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.

#### 1.6.8. Faksionalisme Partai

Menurut Zariski (1960) dalam Budiatri (2017, p. 268) melihat faksi secara lebih spesifik sebagai kelompok intra-partai yang mana anggotanya memiliki identitas serta tujuan yang sama dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Tujuan faksi sangat beragam dimana termasuk mempertahankan patronase serta kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi serta kebijakan partai dan mengusulkan serangkaian nilai baru di internal partai.

##### a. Terbentuknya Faksionalisasi

Budiatri (2017, p. 268) dalam tulisannya menjelaskan bahwa berangkat dari kajian klasik mengenai faksi yang ditulis oleh Beller, Belloni, Zariski, Kollner, Basedau, Satori, Ceron dan Bettcher, ia mengklasifikasikan dalam enam hal yang menjadi penyebab lahirnya faksi yaitu :

- 1) Kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai yang dapat mendorong terbentuknya faksi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu;
- 2) Kompleksitas aspek sosiologis anggota partai contohnya berdasarkan struktur kelas, usia, pendidikan dan lain-lain;

- 3) Faksi terbentuk akibat sistem politik yaitu sistem kepartaian dan sistem pemilu;
- 4) Terjadinya konflik di partai bila pengelolaan keuangan partai dan kerja kampanye partai terdesentralisasi;
- 5) Proses seleksi dan pemilihan internal untuk struktur kepengurusan partai, dimana proses terbuka dan pemilihan internal untuk struktur kepengurusan partai. Dimana proses yang terbuka memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota partai akan memperkecil peluang konflik;
- 6) Gaya kepemimpinan elit partai, dimana ada dua pandangan berbeda, pandangan pertama melihat bahwa pemimpin partai yang otonom dalam membuat keputusan akan mendorong terbentuknya disiplin partai dan mencegah perpecahan, sementara yang lain berpandangan bahwa hal tersebut justru akan membuat konflik partai semakin menajam karena elit cenderung menggunakan faksi pendukung untuk memperkuat kekuasaan dan kepemimpinan politiknya.

b. Dampak faksionalisme partai

Terbentuknya faksionalisme dalam partai politik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya faksionalisme dianggap mampu menjadikan partai menjadi lebih

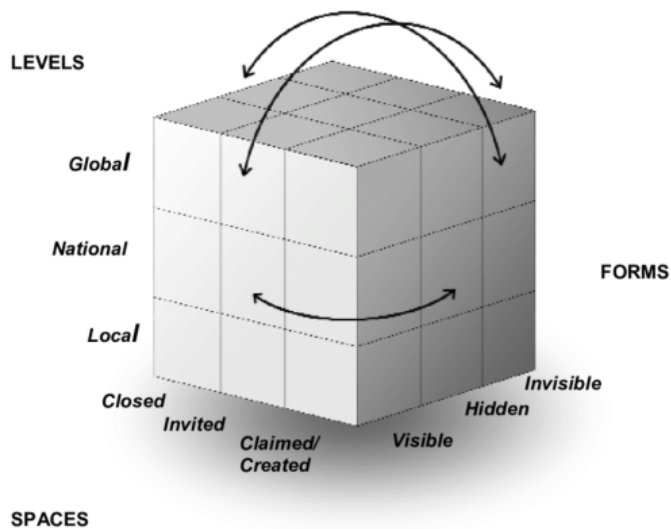


inklusif karena menandakan adanya beragam kelompok berbeda di dalam partai hal tersebut dapat memperkuat serta menstabilkan partai karena faksionalisme diharapkan dapat mengimbangi dominasi di dalam partai oleh kelompok tertentu. Dampak negatif dari faksionalisme adalah kecenderungan perpecahan sering terjadi (Budiatri et al., 2017, pp. 268–269).

#### 1.6.9. *Powercube Theory* (Teori Kubus Kekuasaan)

*Powercube theory* atau teori kubus kekuasaan yang dicetuskan oleh John Gaventa (2006) dalam tulisannya yang berjudul “*Finding the Spaces for Change: A Power Analysis*” yang di publikasikan oleh Institute of Development Studies (IDS) Bulletin, dengan mengambil akar teori dari gurunya yaitu Steven Lukes (Halim, 2014, p. 52). Teori *powercube* oleh Gaventa merupakan kerangka kerja sebagai analisis baru dalam memahami tentang kekuasaan dimana teori ini mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi level, ruang, serta bentuk yang berguna dalam proses eksplorasi berbagai aspek kekuasaan serta bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain (Chalik, 2017, p. 58; Halim, 2014, p. 55; Powercube.net, 2011, p. 7).

Gambar 1. 1. *Powercube Theory*



Sumber Gambar : Bob Hendriks (2010)

Dimensi bentuk dalam teori *powercube* mengacu kepada cara kekuasaan memanifestasikan dirinya dalam hal ini yaitu bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*), tersembunyi (*hidden power*) dan tak terlihat (*invisible power*), dimensi ruang pada *powercube* mengacu pada arena potensi partisipasi serta tindakan dalam hal ini termasuk apa yang disebut tertutup (*closed space*), di per-kenakan (*invited space*), serta ruang yang diciptakan (*claimed/created*), sementara itu dimensi level dalam *powercube* mengacu pada lapisan yang berbeda dari bagaimana cara pengambilan keputusan serta wewenang yang dimiliki pada skala vertikal dalam hal ini lokal, nasional serta global (Chalik, 2017, p. 58; Gaventa, 2006, p. 4; Powercube.net, 2011, p. 10).

*Powercube* dapat dibangun serta dapat digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang “ekspresi kekuasaan” : “kekuasaan atas”, “kekuasaan untuk”, “kekuasaan dengan”, “kekuasaan dalam” (Chalik,

2017, p. 59; Gaventa, 2006, p. 2; Powercube.net, 2011, p. 11). Berbicara mengenai ekspresi kekuasaan, kekuasaan sering kali didefinisikan hanya dalam istilah negatif, dan sebagai bentuk dominasi, tetapi juga dapat menjadi kekuatan positif bagi kapasitas individu dan kolektif untuk bertindak demi perubahan. Lisa VeneKlasen dan Valeries Miller dalam *A New Weave of Power* (2002, p. 55) dalam Powercube.net (2011, p. 11) menjelaskan empat “ekspresi kekuasaan” sebagai berikut:

a. Kekuasaan Atas (*Power Over*)

Bentuk kekuasaan yang paling umum dikenal yaitu “kekuasaan atas”, memiliki banyak asosiasi negatif bagi orang-orang, seperti penindasan, pemaksaan, diskriminasi, korupsi, dan pelecehan. Kekuasaan dipandang sebagai jenis hubungan menang-kalah. Memiliki kekuatan melibatkan mengambilnya dari orang lain, dan kemudian menggunakannya untuk mendominasi dan mencegah orang lain mendapatkannya. Dalam politik, mereka yang mengontrol sumber daya serta pengambilan keputusan memiliki kekuasaan atas mereka yang tidak. Ketika orang tidak diberikan akses ke sumber daya yang penting seperti tanah, akses kesehatan, dan pekerjaan, “kekuasaan atas” melanggengkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Dengan tidak adanya model serta hubungan alternatif, orang pada akhirnya mengulangi pola “*power over*” dalam hubungan pribadi, komunitas dan institusi mereka. Hal ini juga berlaku

untuk orang-orang yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan atau tidak berdaya. Ketika mereka mendapatkan kekuasaan dalam posisi kepemimpinan, mereka terkadang meniru penindas. Karena alasan ini, para pendukung tidak dapat berharap bahwa pengalaman dikucilkan mempersiapkan orang untuk menjadi pemimpin yang demokratis. Bentuk-bentuk baru kepemimpinan dan pengambilan keputusan harus didefinisikan, diajarkan, dan dihargai secara eksplisit untuk mempromosikan bentuk-bentuk kekuasaan yang lebih demokratis. Praktisi dan akademisi telah mencari cara yang lebih kolaboratif untuk berlatih dan menggunakan kekuasaan. Tiga alternatif yaitu “kekuasaan dengan”, “kekuasaan untuk” dan “kekuasaan dalam” menawarkan cara-cara positif untuk mengekspresikan kekuatan yang menciptakan kemungkinan untuk membentuk hubungan yang lebih adil. Dengan menegaskan kapasitas orang untuk bertindak secara kreatif, mereka memberikan beberapa prinsip dasar untuk membangun strategi pemberdayaan.

b. Kekuasaan Dengan (*Power With*)

Kekuasaan dengan (*power with*) berkaitan dengan bagaimana menemukan kesamaan di antara berbagai kepentingan dan membangun kekuasaan kolektif. Berdasarkan atas saling mendukung, solidaritas dan kolaborasi. “Kekuasaan dengan” dapat membantu dalam membangun jembatan lintas

kepentingan yang berbeda untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempromosikan hubungan yang adil.

c. Kekuasaan Untuk (*Power To*)

Kekuasaan untuk (*power to*) mengacu pada potensi untuk setiap orang dalam membentuk kehidupan dunianya. Ketika didasarkan pada saling mendukung dapat membuka kemungkinan tindakan bersama, atau “kekuasaan dengan”.

d. Kekuasaan Dalam (*Power Within*)

Kekuasaan dalam (*power within*) berkaitan dengan rasa harga diri serta pengetahuan diri seseorang. Mencakup kemampuan untuk mengenali perbedaan individu sambil menghormati orang lain. Kekuasaan dalam adalah kapasitas dalam membayangkan serta memiliki harapan, itu menegaskan pencarian manusia dalam mencapai martabat dan dalam pemenuhan kebutuhan. Banyak upaya menggunakan pencitraan serta refleksi individu dalam membantu menegaskan nilai pribadi dan mengenali apa itu “kekuasaan dalam” dan “kekuasaan dengan”. Kedua bentuk kekuasaan ini disebut sebagai agen–kemampuan dalam bertindak dan mengubah dunia.

Bentuk ekspresi kekuasaan diatas mulanya tumbuh sebagai cara mengeksplorasi bagaimana aktor yang kuat mengontrol agenda dan kemampuan aktor yang kurang kuat untuk membangun kesadaran dan tindakan mereka dalam perubahan. Tetapi juga dapat digunakan untuk

memikirkan bukaan (*openings*), tingkat (*level*), dan strategi untuk menjalankan kelompok. Misalnya untuk memperkuat kekuatan dalam bertindak dengan melihat bagaimana kelompok yang dibentuk dengan para aktor yang bekerja pada setiap dimensi dalam aspek *powercube*, kita dapat mengeksplorasi sebuah potensi dalam membangun “kekuasaan dengan” orang lain. Dan dengan menggunakan konsep seperti “kekuasaan tak terlihat” (*hidden power*) dan “ruang yang di ciptakan” (*created spaces*), kita dapat mengeksplorasi masalah “kekuasaan dalam” (*power within*).

Meskipun secara visual disajikan sebagai kubus, penting untuk memikirkan setiap sisi kubus sebagai dimensi atau himpunan hubungan, bukan sebagai himpunan kategori tetap atau statis. Setiap dimensi *powercube* baik level, ruang, bentuk dapat dilihat sebagai kontinum atau skala. Misalnya, meskipun dimensi level sering digunakan untuk merujuk pada pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan global, namun terdapat banyak level lebih dari itu. Demikian pula, bisa ada berbagai ruang untuk keterlibatan di sepanjang kontinum atau skala ruang. Namun penting tetap diingat bahwa setiap dimensi dalam *powercube* terus menerus saling berhubungan satu sama lain, terus menerus mengubah sinergi kekuasaan. Misalnya apa yang terjadi di tingkat keputusan di global dapat mempengaruhi ruang yang tersedia untuk partisipasi dan keterlibatan ruang partisipasi mempengaruhi bentuk–bentuk kekuasaan di dalamnya.

Sementara itu penggunaan teori *powercube* dianggap relevan sebagai kerangka analisa tentang bagaimana kekuasaan itu

diinterpretasikan dalam konteks politik lokal terhadap proses demokratisasi di daerah berkaitan dengan cara kekuasaan memmanifestasikan dirinya serta membantu memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor, persoalan serta situasi yang menjadi latarbelakang sekaligus dapat mengantarkan kepada alasan mengapa seseorang berpotensi memenangkan pertarungan politik (Chalik, 2015, p. 365, 2017, p. 58; Fadli et al., 2018, p. 121; Halim, 2014, p. 55).

#### 1.6.9.1. Dimensi Level

Dalam *powercube* menyadari bahwa apa yang terjadi di semua tingkatan berpotensi signifikan untuk mempertimbangkan hubungan antar mereka. Oleh sebab itu, dalam *powercube* mengacu pada berbagai lapisan pengambilan keputusan dan otoritas yang diadakan pada skala vertikal, khususnya global, nasional, dan lokal.

##### a. Level Global

Globalisasi dan bentuk-bentuk baru pemerintahan global telah menciptakan beragam ruang formal dan informal, negara bagian dan non-negara untuk partisipasi dan pengaruh di tingkat di luar negara bangsa. Di tingkat internasional, ini termasuk lembaga formal seperti yang terkait dengan PBB, Bank Dunia (IMF) (Powercube.net, 2011, p. 25).

##### b. Level Nasional

Pemerintah nasional masih merupakan pintu masuk penting dalam perubahan. Pemerintah nasional secara resmi mewakili warga negara di

arena pemerintahan global, atau yang dapat memutuskan apakah akan melaksanakan perjanjian internasional atau tidak. Sementara banyak aktivis dan juru kampanye dalam beberapa tahun terakhir berfokus pada bentuk aksi warga global, semakin banyak aktor yang mengakui pentingnya perubahan tingkat nasional juga, termasuk fokus pada parlemen, badan eksekutif, partai politik nasional, pengadilan, dan sejenisnya (Powercube.net, 2011, p. 26).

c. Level Lokal

Dalam banyak konteks, arena pengambilan keputusan lokal merupakan titik kritis pengaruh untuk memegang dan menantang kekuasaan. Dalam sistem federal seperti Amerika Serikat atau India, pemerintah tingkat negara bagian adalah aktor yang sangat penting dengan badan pembuat keputusan mereka sendiri juga. Dalam dua dekade terakhir, program desentralisasi juga menjadikan tingkat daerah sangat penting, baik melalui program pemerintah daerah, maupun sejumlah struktur lain terhadap partisipasi dalam proyek pembangunan (Powercube.net, 2011, p. 27).

1.6.9.2. Dimensi Ruang

Gagasan tentang “ruang” secara luas digunakan di seluruh literatur tentang kekuasaan, kebijakan, demokrasi dan tindakan warga negara. Dalam pendekatan *powercube* yang dirancang sebagai alat dalam menganalisis bagaimana kekuasaan mempengaruhi tindakan dan partisipasi juga merujuk



pada arena pengambilan keputusan dan forum aksi, namun ruang tersebut juga dapat mencakup “ruang” lain yang di pandang sebagai peluang, momen dan saluran dimana di ruang tersebut dapat bertindak untuk mempengaruhi kebijakan, wacana, keputusan serta hubungan yang mempengaruhi kehidupan dan kepentingan mereka (Gaventa, 2006, p. 4; Powercube.net, 2011, p. 18) Dalam *powercube* biasanya mengacu pada tiga ruang yaitu ruang tertutup (*close space*), ruang yang di perkenalkan (*invited space*), dan ruang yang di ciptakan (*claimed / created space*).

a. Ruang Tertutup (*close space*)

Keputusan dibuat oleh serangkaian aktor di balik pintu tertutup, tanpa alasan apa pun untuk memperluas batas-batas inklusi. Ruang tertutup adalah tempat elit seperti politisi, birokrat, para ahli, bos, manajer, dan pemimpin membuat keputusan dengan sedikit konsultasi atau keterlibatan yang luas (Gaventa, 2006, p. 5; Powercube.net, 2011, p. 19).

b. Ruang di Perkenalkan (*invited space*)

Di banyak masyarakat dan pemerintahan, tuntutan partisipasi telah menciptakan peluang baru dalam keterlibatan dan konsultasi biasanya melalui “*invited*” dari berbagai otoritas baik itu pemerintah, lembaga di tingkat nasional atau organisasi non-pemerintah. Ruang yang diperkenalkan dapat diatur artinya dilembagakan dan berkelanjutan seperti yang kita temukan di berbagai forum partisipatif yang dibentuk secara hukum atau lebih sementara yaitu melalui konsultasi satu kali. Dengan semakin berkembangnya bentuk-bentuk baru “tata kelola partisipatif”, ruang-ruang

ini terlihat di setiap tingkat, mulai dari kebijakan lokal, nasional, dan bahkan forum global, dan seringkali juga di dalam organisasi dan tempat kerja (Powercube.net, 2011, p. 20).

c. Ruang di Ciptakan (*claimed / created space*)

Andrea Cornwall dalam Powercube.net (Powercube.net, 2011, p. 20) merujuk pada ruang-ruang ini sebagai ruang organis atau alamiah yang muncul dari kumpulan perhatian atau identifikasi umum dan mungkin muncul sebagai hasil dari mobilisasi populer seperti seputar identitas atau masalah berbasis masalah, atau mungkin terdiri dari ruang di mana orang yang berpikiran sama bergabung bersama dalam pengejaran yang sama.

### 1.6.9.3. Dimensi Bentuk

Dimensi bentuk dalam powercube memfokuskan bagaimana kekuasaan memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

a. Kekuasaan Terlihat (*visible power*)

Bentuk kekuasaan yang terlihat adalah perebutan kepentingan yang terlihat di ruang publik atau badan pembuat keputusan formal seringkali merujuk pada suatu badan politik misalnya badan legislatif, badan pemerintah daerah, majelis lokal, atau forum konsultatif. Tetapi juga dapat diterapkan pada wilayah pengambilan keputusan organisasi dan bahkan gerakan sosial atau ruang lain untuk aksi kolektif. Kekuasaan yang terlihat mengasumsikan bahwa arena pengambilan keputusan adalah arena bermain

netral, di mana setiap pemain yang memiliki masalah untuk diangkat dapat terlibat dengan bebas. Juga diasumsikan bahwa para pemangku kepentingan menyadari keluhan mereka dan memiliki sumber daya, organisasi dan lembaga untuk menyuarakan pendapat mereka (Powercube.net, 2011, p. 13).

*Visible power* mencakup aspek kekuasaan politik yang terlihat yang dapat didefinisikan sebagai aturan formal, struktur, kewenangan dan prosedur sebuah keputusan diambil, dengan kata lain ini tentang bagaimana orang-orang yang memiliki kekuasaan menggunakan prosedur dan struktur yang ada untuk mengontrol tindakan orang lain (*International Peacebuilding Advisory Team, 2015, p. 2; WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH, 2012, p. 1*).

b. Kekuasaan Tersembunyi (*hidden power*)

Bentuk kekuasaan tersembunyi digunakan untuk mempengaruhi kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dengan menciptakan hambatan partisipasi dengan cara mengecualikan isu-isu penting dari mata publik, atau dengan mengontrol politik “di belakang panggung” (Powercube.net, 2011, p. 13).

Menurut Schattscheider (1960, p. 71) dalam Powercube.net (2011, p. 13) melalui bentuk-bentuk kekuasaan yang tersembunyi pilihan-pilihan alternatif dibatasi dimana orang-orang yang kurang berkuasa dan perhatian mereka dikecualikan dan aturan main ditetapkan untuk bias terhadap orang-orang dan isu-isu tertentu. Para akademisi sudah menggambarkan bentuk

kekuasaan ini sebagai “mobilisasi bias” di mana “beberapa masalah diatur ke dalam politik sementara yang lain diatur”. *Hidden power* dijalankan ketika sekelompok orang ataupun institusi yang berkuasa mempertahankan pengaruhnya dengan menetapkan serta memanipulasi agenda dan mengucilkan mengontrol siapa yang masuk dalam ruang pengambilan keputusan, dinamika ini beroperasi di banyak tingkatan untuk mengesampingkan perhatian dan kelompok yang kurang kuat alhasil mereka yang memiliki kekuasaan dapat melihat dan memahami kondisi ini tetapi yang lainnya tidak (*International Peacebuilding Advisory Team, 2015, p. 2; WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH, 2012, p. 1*).

c. Kekuasaan Tak Terlihat (*invisible power*)

Menurut Powercube.net (2011, p. 14) kekuasaan tak terlihat merupakan kekuasaan yang terbentuk melalui kontrol terhadap lembaga-lembaga yang membentuk serta menciptakan norma dan nilai seperti lembaga keagamaan, media, televisi, budaya yang diamalkan, gagasan populer tentang pemerintah dan tentang pejabat dan politisi, dan lain – lain. *Invisible power* membentuk batas psikologis dan ideologis partisipasi dengan mempengaruhi cara individu berpikir tentang dunia, tingkatan ini membentuk keyakinan orang, kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*) beroperasi dengan cara dimana orang akan mengadopsi sistem kepercayaan yang di buat oleh mereka yang memiliki kekuasaan (*International Peacebuilding Advisory Team, 2015, p. 2; WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH, 2012*).

## **1.7. Definisi Konseptual**

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti sebagai berikut:

### **1.7.1. Pilkada**

Pilkada merupakan sebuah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk memilih calon pemimpin di daerah secara langsung, bebas, umum, adil, jujur dan rahasia.

### **1.7.2. Calon Independen**

Calon Independen adalah seseorang individu yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum tanpa melalui mekanisme partai politik.

### **1.7.3. Petahana (Incumbent)**

Merupakan sebuah jabatan, kedudukan, atau posisi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan, pangkat, atau posisi dalam ketatanegaraan atau politik yang ikut kembali berkontestasi dalam sebuah pemilihan umum untuk jabatan, pangkat, dan posisi yang sama dalam periode berikutnya.

### **1.7.4. Pelembagaan Sistem Kepartaian**

Merupakan alat pemahaman politik dalam demokrasi baru dalam melihat tingkat pelembagaan dalam sistem tertentu, Mainwaring dan Scully merekomendasikan untuk memeriksa empat fitur sistem kepartaian meliputi tingkat stabilitas dalam persaingan antar partai, sejauh mana akar partai di masyarakat, legitimasi yang dianggap dimiliki partai dan pemilu dalam

menentukan siapa yang memerintah dan terakhir soliditas partai sebagai organisasi.

#### 1.7.5. Konsep Elit Politik

Individu yang memiliki kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lainnya, dimana kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain

#### 1.7.6. Teori Modal

Merupakan bentuk atas aktualisasi kekuasaan

#### 1.7.7. Teori Konflik

Diartikan sebagai kekerasan, kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi.

#### 1.7.8. Faksionalisme Partai

Sebagai kelompok intra – partai yang mana anggotanya memiliki identitas serta tujuan yang sama dan bekerja sama dalam mencapai tujuan.

#### 1.7.9. *Powercube* Theory

*Powercube Theory* merupakan suatu kerangka teori untuk menganalisis dalam memahami kekuasaan dimana teori ini memiliki tiga bagian atau dimensi yaitu dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk.

### **1.8. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan sebuah petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dengan demikian, seorang penulis dapat akan dengan mudah mengetahui suatu variabel yang akan di teliti.

### 1.8.1. *Powercube Theory* (Teori Kubus Kekuasaan)

#### a. Dimensi Level

##### 1. Global

Pengaruh kekuasaan di tingkat Global

##### 2. Nasional

Pengaruh kekuasaan di tingkat Nasional

##### 3. Lokal

Pengaruh kekuasaan di tingkat Lokal

#### b. Dimensi Ruang

##### 1. Tertutup (*close space*)

Keputusan dibuat oleh serangkaian aktor di balik pintu tertutup, tanpa alasan apa pun untuk memperluas batas-batas inklusi

##### 2. Di perkenakan (*invited space*)

Partisipasi yang terbuka dalam pengambilan keputusan.

##### 3. Diciptakan (*claimed / created space*)

Ruang organis atau alamiah yang muncul dari kumpulan perhatian atau identifikasi umum dan mungkin muncul sebagai hasil dari mobilisasi populer seperti seputar identitas atau masalah berbasis masalah.

#### c. Dimensi Bentuk

##### 1. Kekuasaan terlihat (*Visible Power*)

Penggunaan kekuasaan yang terlihat di ruang publik, mencakup aspek kekuasaan politik yang terlihat yang dapat didefinisikan

sebagai aturan formal, struktur, kewenangan dan prosedur sebuah keputusan diambil, dengan kata lain ini tentang bagaimana orang – orang yang memiliki kekuasaan menggunakan prosedur dan struktur yang ada.

2. Kekuasaan tersembunyi (*Hidden Power*)

Penggunaan kekuasaan didasarkan pada kepentingan pribadi, yaitu bagaimana mempertahankan kekuasaan dan hak keistimewaan seseorang dengan memproduksi hambatan partisipasi dengan cara mengecualikan isu-isu utama dari arena publik, atau mengontrol politik “di belakang panggung”.

3. Kekuasaan tidak terlihat (*Invisible Power*)

Penggunaan kekuasaan yang terbentuk atas kontrol terhadap lembaga-lembaga yang membentuk serta menciptakan norma dan nilai, membentuk batas psikologis dan ideologis partisipasi dengan mempengaruhi cara individu berpikir tentang dunia, tingkatan ini membentuk keyakinan orang beroperasi dengan cara dimana orang akan mengadopsi sistem kepercayaan yang di buat oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013, p. 8) metode penelitian kualitatif sering disebut



penelitian naturalistik disebabkan penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan menurut Nazir (2013, p. 43) Metode deskriptif yaitu :

*“Adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.*

Menurut Jozef Raco (2010) Metode deskriptif ini memiliki tujuan menggambarkan sebuah realita, gejala serta fakta. Penulis memilih metode kualitatif ini beralasan karena metode kualitatif memiliki teori pendekatan langsung yang dapat mendukung dalam menganalisa atau mengetahui apa saja yang melatarbelakangi majunya calon petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah dalam pemilihan kepala daerah calon bupati serta wakil bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 mengingat mereka berdua baik Romi dan Robby merupakan kader Partai Amanat Nasional baik dalam legislatif dan eksekutif memegang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 1.9.2. Jenis Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua macam sumber data yaitu :

1. Data Primer menurut Arikunto (2010, p. 22) merupakan data berbentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan atau secara langsung, dan perilaku yang dilakukan oleh subjek.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung misalnya dokumen, buku, jurnal, tesis, web, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### 1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2013, p. 224). Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang narasumber atau responden, dan jawaban-jawaban responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara) (Nazir, 2013, p. 170). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara untuk mencari informasi terkait majunya pasangan calon petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah melalui jalur independen dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, dokumentasi dapat berupa otobiografi, catatan harian, surat, artikel, surat kabar, buku, dan laporan yang berkaitan dengan majunya pasangan calon petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah melalui jalur independen dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 bupati dan wakil bupati kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Dengan menggunakan studi pustaka diharapkan penulis dapat memperoleh informasi mengenai teknik-teknik penelitian yang akan dilakukan, dengan harapan penelitian penulis bukan hasil duplikasi. Menurut Nazir (2013, p. 79) dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitian mereka.

#### 1.9.4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan suatu penelitian hal yang paling utama adalah pengumpulan data. Namun data yang telah terkumpul tidak akan bermakna apabila tidak diolah dan dianalisis. Bogdan dalam Sugiyono (2013, p. 224) mengatakan bahwa :

*“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,*

*catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.*

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Namun, menurut Sugiyono (2013, p. 245) mengatakan bahwa “analisis lebih difokuskan selama proses di lapangan, bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan analisis data model Mikles dan Huberman. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013, p. 246) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah”. Dalam aktivitas analisis data dengan cara *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Adapun ketiga rangkaian proses analisis data model Mikles dan Huberman penulis terapkan sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data bermakna sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan padahal-hal penting, dicari tema serta polanya dan kemudian membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data display* merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan akan memberikan gambaran penelitian menyeluruh. Proses penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun parsial. Penyajian data kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

## 3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan/ Verifikasi)

Kesimpulan merupakan suatu upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat serta dapat mudah difahami dengan mengacu pada tujuan penelitian.